

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Achmad, Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Admosudirjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998.

Dirdjosisworo, Soedjono, Pungli : Analisa Hukum dan Kriminologi.

Effendy, Marwan, Penyimpangan Penggunaan Anggaran Dan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah dari Aspek Pidana, Jakarta 2005.

Fauzan, Achmad, Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri, (Bandung: Yrama Widya, 2007)

Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002.

Klitgaard, Robert, membasmi korupsi (terjemahan), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2005.

Mulyono, Anton M., dkk, Kamus Besar Indonesia, Cet. VI, Balai pustaka, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, “Penelitian Hukum”, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2005.

-----, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta 2014.

M. Hadjon, Philipus, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997.

-----, Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Surabaya 1997.

Merokusumo, Sudikno, Hukum Acara Indonesia, Yogyakarta 1979.

Pope, Jeremy, Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas), *Transparency Internasional Indonesia*, Jakarta 2003.

Sumaryono, E., Etika Profesi Hukum, Kanisius Yogyakarta, 1995.

Stroink, F.A.M., dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ed. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta tahun 2007.

Soepiadhy, Soetanto, Keadilan Hukum, 28 maret 2012.

-----, Kepastian Hukum, Surabaya 4 April 2012.

Suhadibroto, Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara II, Jakarta : JAMDATUN KEJAKSAAN AGUNG RI, 1994

-----, Pengembalian Aset Korupsi Via Instrumen Perdata, 5 April 2017

Tresna, Komentar HIR, 1978, *Cet*, VIII, Pradnya Paramita, Jakarta.

Utrecht. E., dalam Sudirman Sidabuke, Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor, Malang 2007.

Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas'Gravenhage*, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

UUD Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.24/Pdt.G/2008/PN.Kpj

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 Tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 yang telah di rubah  
dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29  
Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

### **C. Seminar, Jurnal**

Jawaban Jaksa Agung RI dalam rapat dengan komisi III DPR RI, tentang uang  
pengganti perkara tindak pidana korupsi, Jakarta 2007.

Makalah Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik  
Indonesia dalam seminar nasional “Korupsi antara Kausatif dan  
Simptomatik”, kerja sama break brilliant & majalah konstans tanggal 29  
Juni 2006 di hotel bidakara jakarta.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012,  
tentang Administrasi Perkara Perata dan Tata Usaha Negara.

Kejaksaan Agung RI, Peristilahan Hukum Dalam Praktek, Jakarta 1985.

Himpunan Peraturan Tentang ”Pembinaan Pegawai Kejaksaan RI”

Studi Kasus Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kendala Jaksa Dalam  
Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana  
Korupsi, Tahun 2015

#### **D. Internet**

[www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), Transparansi Internasional, 2004, di akses pada tanggal 10 Januari 2017